

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan menurut Rustiadi et al. (2011) dapat diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan suatu negara/wilayah untuk mengembangkan kualitas hidup masyarakatnya. Pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses di mana terdapat saling keterkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkembangan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis dengan seksama sehingga diketahui runtutan peristiwa yang timbul yang akan mewujudkan peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat dari satu tahap pembangunan ke tahap pembangunan berikutnya.

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses untuk perluasan pilihan yang lebih banyak kepada masyarakat melalui upaya pemberdayaan yang mengutamakan peningkatan kemampuan dasar manusia agar dapat sepenuhnya ikut berpartisipasi di segala bidang pembangunan (*United Nation Development Programme, UNDP*). Pembangunan dilakukan bertujuan untuk kepentingan manusia dan masyarakat oleh sebab itu manusia dipandang sebagai subyek pembangunan itu sendiri.

Human Development Report (HDR) menafsirkan pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Pilihan yang dimaksud yang paling penting diantaranya yaitu pilihan untuk berumur panjang dan sehat, pilihan untuk berilmu pengetahuan, dan

pilihan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. (BPS, 2017).

Sejak tahun 1990, United Nations Development Program (UNDP) telah menerbitkan sebuah indikator yang menggabungkan faktor ekonomi dan nonekonomi yang mendefinisikan bahwa kesejahteraan secara lebih luas dari pendapatan Domestik Bruto (PDB) yang dinamakan *Human Index Development* atau yang dinamakan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dimulainya perhitungan indeks pembangunan manusia dengan metode baru yaitu tahun 2010 dan berlaku hingga sekarang. Dimana ukuran pembangunan manusia tersebut yakni: angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, serta besarnya pengeluaran masyarakat untuk berkonsumsi sejumlah kebutuhan pokok yaitu pengeluaran perkapita sebagai pendekatan yang digunakan sebagai tolak ukur dari keberhasilan dalam pembangunan untuk hidup yang layak (*United Nation Development Programme*, UNDP).

Pernyataan UNDP mengabarkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia untuk tahun 2015 menduduki peringkat ke 113 dari 188 negara dan wilayah. Dalam 25 tahun terakhir Indeks Pembangunan Manusia memiliki peningkatan sekitar 30,5 % dalam 25 tahun terakhir. Namun hal ini justru bertolak belakang karena dianggap tidak seimbang dengan meningkatnya sejumlah indikator. Seperti tingkat kemiskinan di Indonesia yang mencapai 140 juta orang dengan biaya hidup kurang dari Rp. 20.000,00 per hari, begitu juga dengan gizi buruk yang diderita sekitar 19,4 juta. Belum

lagi tingginya tingkat kematian ibu sebanyak 305 kematian per 100 ribu kelahiran hidup juga sangat memprihatinkan. Begitu pula tingkat kesehatan dan kematian sebanyak 2 juta anak usia di bawah satu tahun belum menerima imunisasi lengkap. Dan untuk akses layanan dasar masih sangat kurang, sehingga banyak anak yang tidak bersekolah (Fauzi, 2017).

Tabel 1.1
Peringkat Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi di Pulau Sumatra Tahun 2011-2017

DAERAH/ TAHUN	TAHUN						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kepulauan Riau	71.61	72.36	73.02	73.4	73.75	73.99	74.45
Riau	68.90	69.15	69.91	70.33	70.84	71.20	71.79
Aceh	67.45	67.81	68.30	68.81	69.45	70	70.60
Sumatera Barat	67.81	68.36	68.91	69.36	69.98	70.73	71.24
Sumatera Utara	67.34	67.74	68.36	68.87	69.51	70	70.57
Jambi	66.14	66.94	67.76	68.24	68.69	69.62	69.99
Bengkulu	65.96	66.61	67.50	68.06	68.59	69.33	69.95
Sumatera Selatan	65.12	65.79	66.16	66.75	67.46	68.24	68.86
Lampung	64.20	64.87	65.73	66.42	66.95	67.65	68.25
Nasional	67.09	67.7	68.31	68.9	69.55	70.18	70.81

Sumber: Publikasi BPS, ipm.bps.go.id

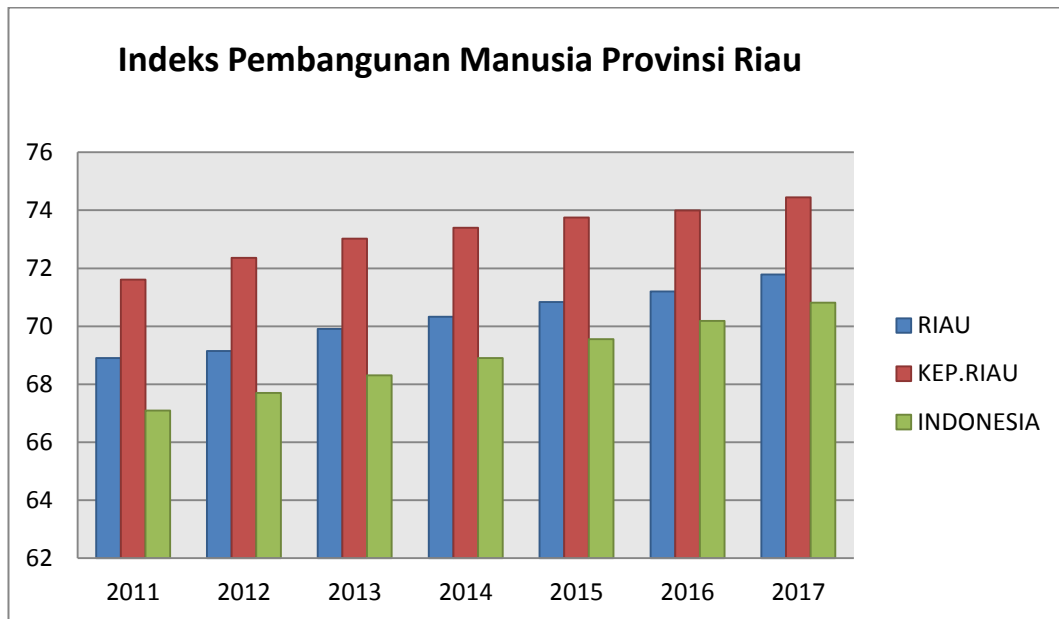
Tabel 1.1 Dari tabel di atas, tahun 2017 Provinsi Riau memiliki IPM 71,79% tertinggi kedua setelah Kepulauan Riau 74,75 % diatas IPM Nasional (70,81%) di Pulau Sumatera. Namun untuk keseluruhan IPM tiap provinsi di Pulau Sumatra terus mengalami peningkatan dari tahun 2011 hingga tahun 2017. Dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia, maka semakin tinggi mutu sumber daya manusianya.

Tabel 1.2 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau periode 2011-2017

DAERAH/ TAHUN	TAHUN						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
KEPULAUAN RIAU	71.61	72.36	73.02	73.4	73.75	73.99	74.45
RIAU	68.90	69.15	69.91	70.33	70.84	71.20	71.79
NASIONAL	67.09	67.7	68.31	68.9	69.55	70.18	70.81

Sumber: Publikasi BPS, ipm.bps.go.id

Menurut publikasi Badan Pusat Statistik pada tahun 2011 hingga 2017 menunjukkan bahwa tingkat indeks pembangunan manusia provinsi Riau berada pada posisi kedua dari 9 provinsi yang berada di pulau Sumatra, dimana posisi pertama diduduki oleh provinsi Kepulauan Riau. Pada penelitian ini akan membahas kondisi pembangunan manusia khususnya di Provinsi Riau periode 2011-2017. Provinsi Riau sendiri merupakan provinsi yang terletak di tengah pulau Sumatera, Provinsi Riau salah satu penghasil migas terbesar setelah provinsi Kepulauan Riau di pulau Sumatera. dengan luas daerah 87.024 km² dan kepadatan penduduk dengan rata-rata 6. 658 jiwa per km². Provinsi ini memiliki 2 kota yaitu Pekanbaru dan Dumai serta 10 kabupaten yaitu Kuantan singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Siak, Kampar, Rokan Hulu, Bengkalis, Rokan Hilir, dan Kepulauan Meranti. Dari data tersebut dapat di lihat dalam bentuk perbandingan grafik sebagai berikut:



Sumber: Publikasi BPS, ipm.bps.go.id

Gambar 1.1
perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau dengan Indeks pembangunan Manusia Nasional

Provinsi Riau sendiri terbilang mempunyai jumlah kabupaten yang banyak, melihat dari kepadatan penduduk yang ada namun hanya beberapa kota saja yang memiliki wilayah luas diimbangi dengan jumlah penduduk yang ada, masih banyak kehidupan sehari-hari masyarakat yang kurang sejahtera hal ini ditimbulkan karena permasalahan seperti kurangnya sarana dan pra sarana kesehatan, pendidikan, dan penunjang kesejahteraan yang lain untuk pembangunan yang kurang merata. peran pemerintah yang belum sepenuhnya optimal sehingga terkesan mengesampingkan masyarakat dan justru memfasilitasi investor. Berikut adalah ulasan mengenai indeks pembangunan manusia Provinsi Riau:

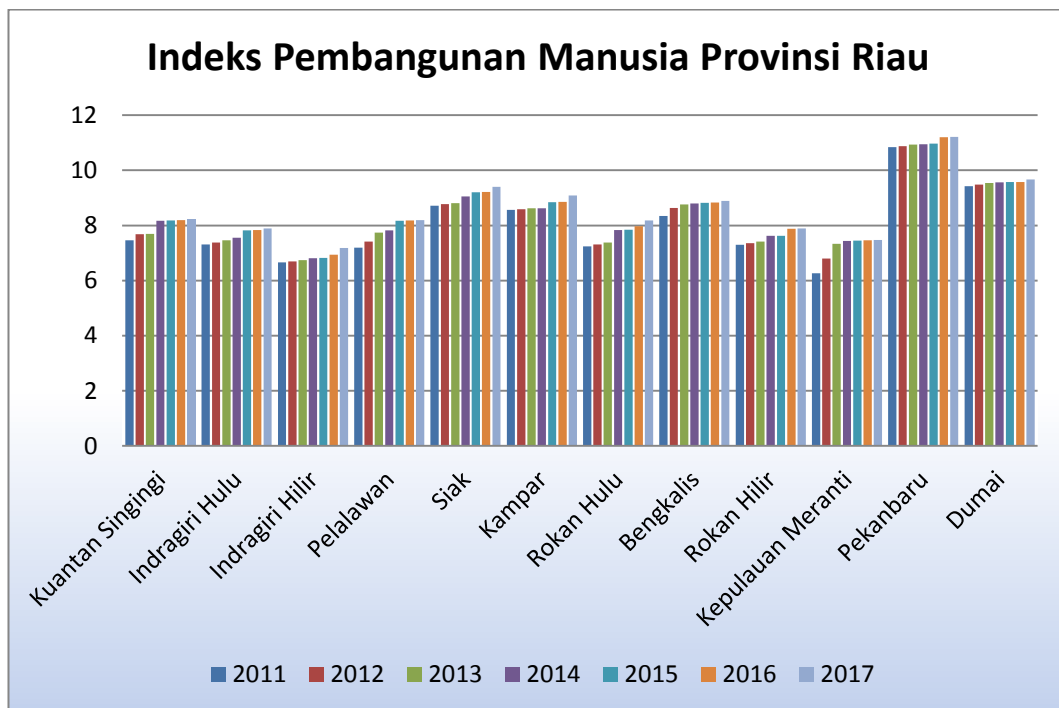
Tabel 1.2 Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau periode tahun 2011-2017

KABUPATEN/KOTA	TAHUN						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kuantan Singingi	7.46	7.68	7.70	8.17	8.18	8.19	8.20
Indragiri Hulu	7.31	7.38	7.46	7.55	7.82	7.83	7.89
Indragiri Hilir	6.66	6.70	6.74	6.81	6.82	6.94	7.18
Pelalawan	7.20	7.41	7.74	7.82	8.17	8.18	8.19
Siak	8.72	8.77	8.81	9.05	9.20	9.21	9.40
Kampar	8.56	8.59	8.62	8.62	8.84	8.85	9.09
Rokan Hulu	7.24	7.31	7.38	7.83	7.84	7.97	8.18
Bengkalis	8.34	8.64	8.76	8.80	8.82	8.83	8.89
Rokan Hilir	7.30	7.36	7.42	7.62	7.62	7.88	7.89
Kepulauan Meranti	6.27	6.80	7.33	7.44	7.45	7.46	7.47
Pekanbaru	10.84	10.88	10.93	10.95	10.97	11.20	11.21
Dumai	9.42	9.48	9.54	9.56	9.57	9.58	9.67

Sumber: Publikasi BPS, ipm.bps.go.id

Dari data indeks pembangunan manusia di atas dapat terlihat bahwa pembangunan kualitas hidup masyarakat Provinsi Riau meningkat dari tahun ke tahun secara keseluruhan di kabupaten/kota Provinsi Riau. Rata-rata peningkatan IPM paling tinggi adalah kabupaten Pelalawan dengan rata-rata kenaikan sebesar 0,99% dari tahun 2011 hingga 2017. Disusul oleh kabupaten indragiri hilir dengan rata-rata kenaikan sebesar 0,32% dari tahun 2011 hingga 2017. Kemudian Kabupaten Indragiri Hulu dari tahun 2011 hingga tahun 2017 mengalami peningkatan dengan rata-rata 0,20% pada tiap tahunnya. Selanjutnya kabupaten Kuantan Singingi mengalami peningkatan dari tahun 2011 hingga 2017 dengan rata-rata peningkatan 0,12%. kabupaten Siak mengalami peningkatan dari tahun 2011 hingga 2017 dengan rata-rata peningkatan 0,11%. Kabupaten Kepulauan meranti mengalami peningkatan dari tahun 2011 hingga 2017 dengan rata-rata peningkatan 0,2%. kabupaten Rokan hilir mengalami peningkatan dari tahun 2011

hingga 2017 dengan rata-rata peningkatan 0,098%. Kabupaten Bengkalis mengalami peningkatan dari tahun 2011 hingga 2017 dengan rata-rata peningkatan 0,091%. Kemudian kota Pekanbaru mengalami peningkatan dari tahun 2011 hingga 2017 dengan rata-rata peningkatan 0,063%. Kota Dumai mengalami peningkatan dari tahun 2011 hingga 2017 dengan rata-rata peningkatan 0,041% dan terakhir kabuapten Kampar mengalami peningkatan dari tahun 2011 hingga 2017 dengan rata-rata peningkatan 0,08%.



Sumber: Publikasi BPS, ipm.bps.go.id

Gambar 1.2
perbandingan Indeks Pembangunan Manusia antar kabupaten/kota di Provinsi Riau

Dari uraian-uraian tersebut maka penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang indeks pembangunan manusia di Provinsi Riau dengan penelitian yang berjudul **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau Periode 2011-2017”**.

B. Batasan masalah

Mengingat adanya faktor keterbatasan dan banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia, maka dirumuskan masalah yang akan diteliti hanya membahas pada:

1. Variabel yang digunakan yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah bidang Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah bidang Kesehatan, dan Jumlah Penduduk Miskin.
2. Dalam penelitian ini mengambil rentan tahun antara tahun 2011-2017.
3. Lokasi penelitian yaitu Provinsi Riau yang terdiri dari 10 kabupaten dan 2 kota yang meliputi kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kepulauan Meranti, kota Pekanbaru dan kota Dumai

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Riau?
2. Bagaimana pengaruh pengeluaran Pemerintah bidang pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Riau?
3. Bagaimana pengaruh pengeluaran Pemerintah bidang kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Riau?
4. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk miskin terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Riau?

D. Tujuan Penelitian

Ada pun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Riau periode 2011-2017.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran Pemerintah bidang pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Riau periode 2011-2017.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran Pemerintah bidang kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Riau periode 2011-2017.
4. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk miskin terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Riau periode 2011-2017.

E. Manfaat Penelitian

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, yaitu:

1. Bagi Penulis yaitu agar dapat menambah ilmu serta wawasan tentang hal yang diteliti sehingga mampu membandingkan antara teori yang diterima selama perkuliahan dan realita di lapangan.
2. Bagi institusi pendidikan yaitu dapat digunakan sebagai tambahan referensi bagi mahasiswa atau pun pelajar yang akan melakukan penelitian tentang indeks pembangunan manusia.
3. Bagi masyarakat yaitu agar dapat memberikan informasi mengenai masalah pembangunan manusia di Provinsi Riau.
4. Bagi instansi pemerintah yaitu agar dapat digunakan untuk referensi dalam mengambil kebijakan untuk kesejahteraan penduduk serta pembangunan yang berkelanjutan bertujuan untuk peningkatan kondisi ekonomi yang lebih baik.